

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.1 Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dimana Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut F. Sugeng Istianto(2001:65), Otonomi Daerah merupakan Hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri.

Sedangkan menurut Vincent Lemius didalam Riant Nugroho (dalam Andreas), mengemukakan Otonomi Daerah itu Kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.Selanjutnya untuk urusan pemerintahan serta prinsipnya pasal 13 dan 14 adalah:

1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

2. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

3. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten atau kota.
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Sedangkan dalam pasal 14 yaitu:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
2. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
3. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

2.2 Konsep Pemerintah

Sebagai sebuah Negara sudah pasti memiliki pemerintah yang bertugas menjalankan pemerintahan agar mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakatnya, oleh karena itu pemerintah pusat memiliki peran untuk pembangunan dalam suatu Negara dan pemerintah daerah memiliki peran untuk pembangunan dalam suatu daerahnya.

2.2.1 Pengertian Peran

Menurut Soekanto (dalam Andreas), peranan merupakan proses dinamis kedudukan status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dia telah menjalankan suatu peranan.

2.2.2 Pengertian Pemerintah

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai Suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan Negara (Haryanto dkk, 1997:2-3).

2.3 Pertambangan

2.3.1 Pengertian pertambangan

Dalam peraturan pemerintah yang di maksud pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan dalam kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi kontruksi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontraksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontraksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Menurut sukandarrumidi, usaha pertambangan adalah semua usaha yang di lakukan seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk di dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia.

Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakannya sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pusat).Di dalam undang-undang pokok pertambangan, usaha-usaha pertambangan tersebut di rumuskan sebagai berikut:

- a. Usaha pertambangan penyelidikan umum ialah penyelidikan geologi ataupun geofisika secara umum, baik di daratan, perairan ataupun dari udara dengan maksud untuk memuat peta geologi umum dalam usaha untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian.
- b. Usaha pertambangan eksplorasi ialah segala usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti atau lebih seksama adanya sifat dan letak bahan galian.
- c. Usaha pertambangan eksploitasi ialah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
- d. Usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkannya serta memperoleh unsur-unsur yang terdapat bahan galian tersebut.
- e. Usaha pertambangan pengangkutan ialah segala usaha pemindahan bahan galian dari daerah eksplorasi, eksploitasi atau dari tempat pengolahan atau pemurnian ke tempat lain.
- f. Usaha pertambangan penjualan ialah segala usaha penjualan dari hasil pengolahan ataupun pemurnian bahan galian.

Sedangkan wilayah pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral atau batubara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari WP yang telah memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ketersediaan data, potensi, dan atau informasi geologi. Serta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang di berikan kepada pemegang izin pertambangan.

2.3.2 Izin Usaha Pertambangan

Berdasarkan UU No. 11 tahun 1967, Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang yang di berikan kepada bahan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Setelah UU No. 4 tahun 2009 diberlakukan maka KP di ubah menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan). KP yang berikan sebelum ditetapkan UU No. 4 tahun 2009 dan PP No. 23 tahun 2010 tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir, serta wajib:

- a. Di sesuaikan menjadi IUP atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sesuai dengan ketentuan PP No. 23 tahun 2010 dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak berlakunya PP tersebut.
- b. Menyampaikan rencana kegiatan kepada seluruh Wilayah KP sampai dengan jangka waktu berakhirnya KP.
- c. Melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat lima tahun sejak berlakunya UU No. 4 tahun 2009

Sebagaimana diatur dalam pasal 1 (7) UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba), izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Merupakan kewenangan pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan IUP. Pasal 6 peraturan pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (PP



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23/2010) mengatur bahwa IUP diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. IUP di berikan kepada:

- a. Badan usaha, yang dapat berupa badan usaha swasta, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah
- b. Koperasi
- c. Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan yang merupakan warga Negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Pemeberian IUP akan di lakukan setelah di perolehnya WIUP (Wilyaha Izin Usaha Pertambangan) dalam satu WIUP dimungkinkan untuk di berikan IUP maupun beberapa IUP

Dalam pasal 36 UU Mineral membagi IUP ke dalam dua tahap, yakni:

- a. IUP Eksplorasi, yakni meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- b. IUP operasi produksi, yang meliputi kegiatan kontruks, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Dalam Pasal 39 UU minerba mengatur bahwa IUP eksplorasi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya.
- c. Nama perusahaan
- d. Lokasi dan Luas Wilayah
- e. Rencana umum tata ruang
- f. Jaminan kesungguhan
- g. Modal investasi
- h. Perpanjangan waktu tahap kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Hak dan kewajiban pemegang IUP
- j. Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan
- k. Jenis usaha yang di berikan
- l. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan
- m. Perpajakan
- n. Penyelesaian perselisihan
- o. Iuran tetap dan iuran eksplorasi
- p. Amdal

Sedangkan untuk IUP operasi produksi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

- a. Nama perusahaan
- b. Luas wilayah
- c. Lokasi pertambangan
- d. Lokasi pengolahan dan pemurnian
- e. Pengangkutan dan penjualan
- f. Modal investasi
- g. Jangka waktu berlaku IUP
- h. Jangka waktu tahap kegiatan
- i. Penyelesaian masalah
- j. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang
- k. Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang
- l. Perpanjang IUP



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Hak dan kewajiban pemegang IUP
- n. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan
- o. Perpajakan
- p. Penerimaan Negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi
- q. Penyelesaian perselisihan
- r. Keselamatan dan kesehatan kerja
- s. Konservasi mineral dan batubara
- t. Pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri
- u. Penerapan kaidah keekonomian dan ketekhnikan pertambangan yang baik
- v. Pengembangan tenaga kerja Indonesia
- w. Pengelolaan data mineral atau batubara, dan
- x. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral dan batubara.

Dalam pasa 40 UU minerba di atur bahwa IUP di berikan terbatas pada satu jenis mineral dan batubara. Dalam hal pemegang IUP menemukan mineral lain dalam IUP yang kelolanya, maka pemegang IUP tersebut mendapatkan prioritas untuk mengusahakan mineral yang di temukannya. Sebelum pemegang IUP tersebut mengusahakan mineral lain yang di temukannya, diatur bahwa pemegang IUP tersebut wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri, gubernur, bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- 24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang.

Sementara itu pakar kebijakan publik Thomas Dye, dalam Riant Nugroho (2011:204) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

2.4.1 Kebijakan Pertambangan

Pertambangan menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1

- a. Ayat (1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ayat (6) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
- c. Ayat (19) Pertambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya.

2.5 Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno. B, 2007;146) adalah sebagai tindakan-tindakan yang di lakukan oleh individu-individu (atau sekelompok-sekelompok) pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Menurut Poerwadarminta (dalam Andreas). Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kamus Webster dalam Wahab (2001 :67), merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Menurut Wahab Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2001 : 65), menyatakan bahwa :
Proses implementasi adalah *those action by public or private individuals groups that are directed the achivement of objectives set forth in prior decisions* (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya ujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Implementasi kebijakan Menurut Sunggono (2001: 137) merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Pengeritan implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksanaan yang bisa dipercaya.

Definisi lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Leo Agustino, 2012 :8) dalam (andreas)mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai “pelaksanaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.5.1 Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2.5.2 Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

- b. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

- c. Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

d. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

2.5.3 Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam masa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.5.4 Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

2.6 Penelitian Terdahulu

1. Ernawati, 2013 Pengawasan pengelolaan pertambangan rakyat di dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian :menerangkan bagaimana pengawasan pengelolaan pertambangan yang di lakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pengelolaan pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi penulis meneliti dari sudut pengawasan yang meliputi indikator.
2. Miarsono (2007) skripsi dengan judul : Peran Pemerintah Daerah Dalam Menetapkan Peraturan Pertambangan Batubara di Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peraturan atau kebijakan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan oleh pemerintah Kutai Timur bahwa masa depan industri pertambangan secara umum tergantung pada kebijakan pemerintah yang berimbang antara kepentingan nasional dan kemampuan permodalan untuk tercapainya kemakmuran dan keadilan. Industri pertambangan yang umumnya bercirikan pada modal teknologi dan berlokasi di daerah terpencil dengan areal operasi yang luas, menimbulkan kesan eksklusif dan tercipta jarak dengan masyarakat setempat dengan adanya peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

3. Toraja (2010) skripsi dengan judul : Desentralisasi, Koordinasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pertambangan Emas Pasca Otonomi Daerah. Dari hasil penelitian ini ketegangan antara sentralisasi-desentralisasi kembali terlihat dalam UU Pemda. Pemerintah pusat belum rela menyerahkan kewenangan mengatur (*uitregel*) dan mengurus (*uitvoering*) sepenuhnya kepada daerah. Hal ini tampak dalam pengaturan tentang peraturan daerah yang mengecilkan posisi perda dengan membolehkan pemerintah pusat mencabut perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 145) . Dalam hal ini bisa tafsir atas definisi dan ukuran kepentingan umum dan pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi bisa jadi kembali terulang.
4. Alexander (2001) skripsi dengan judul : Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Penambang Emas Di Daerah Aliran Sungai Kapuas Dan Sungai Melawi Kabupaten Sintang. Dari hasil penelitian menunjukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa Penelitian ini merupakan penelitian yang yuridis normatif yaitu penelitian yang menyangkut ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan, kemudian di analisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai yang ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada dilapangan

2.6.1 Perbedaan dengan penelitian terdahulu

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dari segi aspek penelitian dan penilaiannya, karena penelitian ini lebih cendrung membahas dan mengulas tentang peran pemerintah daerah dalam penertiban penambangan emas tanpa izin yang merusak sungai-sungai kuantan dan merusak ekosistem serta lingkungan di sekitarnya melalui upaya-upaya yang dilakukan. Kemudian disamping dari mengidentifikasi peran pemerintah daerah dalam penertiban penambanga emas tanpa izin peneliti juga mencari tahu dan menganalisa apa saja kendala-kendala dalam penertiba penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Sementara penelitian terdahulu membahas bagaimana pengawasan pengelolaan pertambangan yang di lakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi, serta penelitian pertambangan emas lebih mengarah kepada fungsi pemerintahnya dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.7 Pandangan Islam

Islam mengajurkan setiap manusia untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena bekerja merupakan salah satu pengalaman dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah syariat islam. Bekerja secara baik dan benar bukan hanya akan menghasilkan harta, melainkan juga akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Swt. Bekerjalah dengan baik bukan bekerja tanpa memikirkan dampak baik atau buruk pekerjaan kita, baik pada alam maupun lingkungan.

Ketika kita berbicara tentang bencana, dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa bencana itu merupakan sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kerusakan, kerugian, atau penderitaan. Sedangkan dalam konteks Agama Islam memandang bahwa bencana alam itu adalah kerusakan yang terjadi di atas bumi ini tidak lain hanyalah karena ulah tangan manusia itu sendiri yang selalu merasa tidak puas. Sehingga tanpa merasa bersalah mereka melakukan pertambangan liar yang menggunakan bahan berbahaya yang mengakibatkan rusaknya lingkungan dan pencemaran sungai tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Allah Subhanahu wata'ala berfirman :

{ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [الروم: 41]

Artinya :Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Ar

Rum : 41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ} [العنكبوت: 14]

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Al Ankabut : 14.

{وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [الشورى: 30]

Artinya :Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu). Asy Syuro : 30

Pemahaman dari pendekatan yang telah peneliti jabarkan diatas adalah bahwa sesungguhnya bencana yang datang itu tidak lain adalah karena ulah tangan manusia itu sendiri, baik itu manusia yang melakukan pencemaran sungai dan merusak ekosistemnya maupun manusia yang membuat kebijakan tentang itu. Namun terlepas dari itu semua kita selaku masyarakat mesti mengawal dan menggiring juga dari kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah dan pemimpin kita, jika ada yang melenceng kita mesti meluruskan. Karena Allah SWT Berfirman:

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”. QS An-Nisaa : 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat ini disebutkan bahwa setiap masyarakat wajib untuk mentaati aturan-aturan yang diputuskan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan berdasarkan surat Asy Syuro ayat 30 bahwa musibah yang terjadi menimpah kamu itu adalah ulah tanganmu sendiri, sebagai manusia itu harus menjaga lingkungannya sendiri dan tidak melakukan kerusakan pada lingkunganmu. Jadi bagus tidaknya lingkungan itu tergantung pada tangan manusia itu sendiri.

2.8 Konsep Operasional Penelitian

Tabel 2.1 Konsep Operasional Penelitian

No	Referensi	Indikator	Sub Indikator
1	Peran pemerintah Dalam Penanggulangan penambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Pangean Kabupaten kuantan Singingi (Undang- Undang No 7 tahun 2004 dan Undang- Undang No 4 tahun 2009)	a. Pencegahan Penambangan Emas Tanpa Izin	a. Penyelenggaraan pemberdayaan sumber air dan lingkungan hidup b. Melakukan pembinaan dan pengawasan pemeliharaan sumber air c. Dilarang melakukan kegiatan yang merusak sumber air (undang-undang No 7 tahun 2004)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2		<p>b. Pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Izin</p>	<p>a. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana yang di gunakan.</p> <p>b. Menyegel atau menyita alat-alat yang di gunakan</p> <p>c. Pemeriksaan terhadap orang atau badan yang melakukan penambangan emas tanpa izin (undang-undang No 4 tahun 2009)</p>
3		<p>c. Ketentuan Pidana</p>	<p>a. Bagi yang melakukan penambangan liar di pidana atau di denda.</p> <p>b. Setiap orang yang melakukan kegiatan yang merusak sumber air dan lingkungannya di pidana paling lama 6 tahun</p>

Sumber data: Data olahan undang-undang No 4 tahun 2009 dan undang-undang No 7 tahun 2004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Pemikiran Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber data: Data Olahan 2016